

**Kerjasama Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Masyarakat
dalam Pengembangan Desa Wisata Kaligono, Kecamatan Kaligesing,
Kabupaten Purworejo**

Nida Ulfa*

*Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email : nidaulfa17@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata nasional sangat didukung oleh peran serta pengembangan potensi pariwisata daerah. Sejak adanya kebijakan tentang kepariwisataan, pengembangan desa wisata di Indonesia mulai bermunculan salah satunya adalah Desa Wisata Kaligono. Pengembangan desa wisata menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kaligono.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data/subjek penelitian ini meliputi Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, pemerintah Desa Kaligono, pengelola Pokdarwis Dewi Kano, pengurus dan anggota Pokdarwis Nuansa Alam dan Joko Kendhil serta pengunjung dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak optimal dikarenakan tidak adanya MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak. Realitas kerjasama antara masyarakat Desa Wisata Kaligono dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo terwujud dalam bentuk pelatihan dan pembinaan. Kerjasama tersebut tidak berpengaruh terhadap perbaikan fasilitas obyek wisata. Fasilitas tersebut justru dibangun oleh masyarakat dan bantuan PNPM Pariwisata selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, berdasarkan temuan peneliti dampak positif adanya desa wisata seperti peningkatan perekonomian masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan hasil dari tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan hasil dari kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kata Kunci : kerjasama ; pengembangan desa wisata ; peran pemerintah ; peran masyarakat

ABSTRACT

The success of the development of the national tourism sector is strongly supported by the role of regional tourism development potential. Since the policy on tourism, tourism village development in Indonesia began to emerge one of them is Kaligono Tourism Village. The development of a tourist village demands coordination and cooperation and a balanced role between the government, the private sector and the community. This study aims to describe the cooperation implemented by the Government of Purworejo Regency and the community in the development of Kaligono Tourism Village.

This research is a descriptive research with qualitative approach. Sources / subjects of this research include Head of Promotion and Cooperation of Tourism and Culture Office of Purworejo Regency, Kaligono Village Government, Pokdarwis Dewi Kano manager, Pokdarwis Nuansa Alam, Pokdarwis Joko Kendhil , visitors and community. The data were collected using observation, interview, and documentation study.

The results showed that the cooperation between the community and the Department of Tourism and Culture is not optimal due to the absence of MoU agreed by both parties. The reality of cooperation between the people of Kaligono Tourism Village and the Regional Government of Purworejo Regency is manifested in the form of training and coaching. Cooperation does not affect the improvement of tourism facilities. The facility is actually built by the community and PNPB Tourism aid for three consecutive years. In addition, based on the findings of researchers positive impact of the existence of tourist villages such as improving the economy of the community, the creation of jobs and environmental sustainability is the result of high awareness and community participation, not the result of cooperation between the community and the Department of Tourism and Culture.

Keywords: *Cooperation, Village Tourism Development, The Role of Government, The Role of Society*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata nasional sangat didukung oleh peran dan program peningkatan serta pengembangan potensi pariwisata diseluruh wilayah Indonesia. Pariwisata juga merupakan sektor andalan dalam pembangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat diperlukan dalam menyongsong otonomi daerah. Sejak adanya kebijakan tentang kepariwisataan, pengembangan desa-desa wisata di Indonesia mulai bermunculan. Perbedaan antara desa wisata dengan desa pada umumnya berupa karakteristik khusus yang dimiliki oleh desa wisata sehingga layak menjadi daerah tujuan wisata. Karakteristik khusus tersebut biasanya berupa tradisi dan budaya yang relatif asli serta faktor pendukung seperti sumber daya alam dan lingkungan yang masih asli. Dalam Permenbudpar Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tahun 2010, sebagai berikut:

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Purworejo adalah Desa Kaligono. Desa Wisata Kaligono terbentuk pada bulan Januari 2012 dengan nama akronim Dewi Kano. Letak Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano), berada di Ibukota Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Sebelum menjadi desa wisata, Desa Kaligono memiliki potensi-potensi wisata alam yang sudah banyak pengunjung tetapi belum terkelola. Karena potensi-potensi alam tersebut belum terkelola dengan baik maka pengunjung yang mengunjungi tempat-tempat tersebut cenderung merusak alam dan banyak tindakan-tindakan negatif yang meresahkan masyarakat. Dari situasi tersebut, pemerintah desa bersama dengan tokoh masyarakat memutuskan untuk memilih alternatif yang ketiga yaitu dengan mengelola potensi wisata tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan meningkatkan PADes Kaligono.

Desa Wisata Kaligono dalam membangun pariwisata meraih prestasi sebagai juara ke empat pada Festival Desa Wisata tingkat Jateng dan DIY dan

pada tahun 2014 dan mendapatkan prestasi 10 besar terbaik dalam festival desa wisata nasional. Berdasarkan prestasi yang telah didapatkan, eksistensi Desa Wisata Kaligono meningkat dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Eksistensi Desa Wisata Kaligono dapat dilihat dari kenaikan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel jumlah pengunjung Desa Wisata Kaligono dari tahun ke tahun :

Tabel 1.1
Data Pengunjung Dewi Kano

Tahun	Jumlah Pengunjung
2014	16.440
2015	34.226
2016	45.937
2017	74.327

Sumber: Data Desa Wisata Kaligono

Kenaikan jumlah pengunjung yang terjadi dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan kenaikan PADes. Hal ini dapat membuktikan bahwa tujuan dari desa wisata seperti yang tercantum dalam Peraturan Desa Kaligono Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 bahwa tujuan dari pengelolaan obyek wisata adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) belum terwujud. Berikut ini merupakan data Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Kaligono dari tahun ke tahun :

Tabel 1.2
Data Pendapatan Asli Desa Kaligono

Tahun	PADes
2012	Rp. 21.789.850,-
2013	Rp. 25.500.000,-
2014	Rp. 17.200.000,-
2015	Rp. 35.000.000,-
2016	Rp. 14.000.000,-
2017	Rp. 10.000.000,-

Sumber: Bendahara Desa Kaligono

Kegiatan/ program pengembangan hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Pemangku kepentingan yang dimaksud

meliputi 3 (tiga) pihak, yaitu: Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing-masing. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana kemitraan/kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kaligono.

LANDASAN TEORI

A, Teori Kemitraan

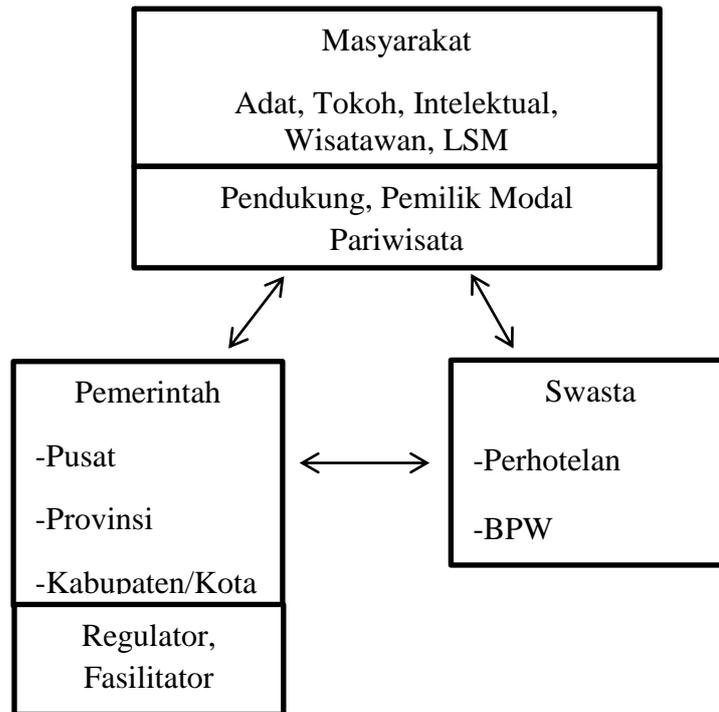
Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.¹ Dalam kemitraan tidak ada pihak yang sifatnya saling membawahi pihak lain, dasar komitmen bersama menjadi tanggungjawab bersama pula yang mewajibkan setiap pihak untuk memberikan input dalam penyusunan agenda kerja yang akan memunculkan kolaborasi *good partnership* antar pihak.

Aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem pariwisata secara umum terdiri dari tiga pilar, yaitu : (1) Masyarakat, (2) Swasta, (3) Pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah

¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 129.

administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya.²

Gambar 1.1 Sektor Pariwisata dalam 3 Pilar



Sumber : Dr. I. Gde Pitana

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) Masyarakat, (2) Swasta, (3) Pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife dalam bukunya Miftachul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). “*Empowerment aims to increase the*

² I Gde Pitana, *Sosiologi Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 96-97.

power of the disadvantaged'. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat "people centered, participatory, empowering, and sustainable".³

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:⁴

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting untuk dilakukan.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktivitasnya.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

4. Kelembagaan

Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti, permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.99.

⁴ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*, Jakarta: Bappenas, 2000, hlm. 7-10.

C. Pengembangan Pariwisata

Selo Soemardjan menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.⁵

D. Desa Wisata

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Pariwisata. Menyebutkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Jadi desa wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah desa yang memiliki potensi wisata dan memiliki fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi.⁶ Dalam desa wisata terdapat dua komponen penting, yaitu:

1. Akomodasi, yaitu sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi, yaitu sebuah kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berinteraksinya wisatawan

⁵ JJ Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm.133.

⁶ Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Pedoman PNPM Mandiri Pariwisata, Bab 1 poin E nomor 4.

sebagai partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data/subjek penelitian ini meliputi Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, pemerintah Desa Kaligono, pengelola Pokdarwis Dewi Kano, pengurus dan anggota Pokdarwis Nuansa Alam dan Joko Kendhil serta pengunjung dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) reduksi data; (2) display/penyajian data; dan, (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Kerjasama

Tujuan diadakannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan Desa Wisata Kaligono karena Desa Wisata Kaligono ingin mencanangkan diri sebagai desa wisata. Keinginan tersebut muncul karena adanya potensi yang layak untuk dikembangkan yaitu Curug Siklothok. Dalam tahapan penyadaran masyarakat, Desa Wisata Kaligono menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa desa wisata akan mampu membawa dampak positif dan keuntungan bagi masyarakat.

Bapak Suroto selaku Kepala Desa Kaligono mengungkapkan bahwa pada awal pembentukan desa wisata terdapat pro kontra dari masyarakat. Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat terhadap desa wisata masih rendah sehingga masyarakat beranggapan bahwa desa wisata identik dengan kebebasan

⁷ Tim KKN-PPM Desa Wisata Cirangkong Subang, 2012, Pedoman Umum Pengembangan Desa Wisata Cirangkong, www.academia.edu/6423956/Buku_Pedoman_Umum_Desa_Wisata di akses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 23.24 WIB.

dan lebih berkonotasi negatif. Dalam tahap penyadaran masyarakat, Pemerintah Desa Kaligono mempunyai inisiatif untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo serta pakar wisata dari UGM. Hal ini dilakukan karena sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat apabila disampaikan oleh orang yang benar-benar ahli di bidang pariwisata.

B. Bentuk Kerjasama

Tindak lanjut kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Desa Wisata Kaligono direalisasikan dalam bentuk :

1. Pelatihan dan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan dan pelatihan pokdarwis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pokdarwis dalam wisata yang ada didaerahnya, khususnya dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat, pelatihan manajemen Pokdarwis dan pelatihan untuk membuat paket-paket wisata. Mengelola

Tanggapan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dalam pengembangan Desa Wisata Kaligono sangat bertolak belakang , salah satu pihak yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berasumsi bahwa pihaknya telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kaligono dengan sebaik-baiknya. Sedangkan disisi lain, masyarakat menganggap bahwa pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut merupakan program yang sudah tidak relevan dengan kondisi Desa Wisata Kaligono. Masyarakat sudah cukup paham dengan teori pelatihan dan saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan secara fisik untuk melakukan inovasi.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh I Gede Pitana Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan bidang pariwisata sebagai:⁸

⁸ I Gede Pitana, *Sosiologi Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 96-97.

a. Regulator

Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator dalam pengembangan bidang pariwisata yang ada di daerahnya. Acuan hukum yang jelas dari pemerintah diharapkan mampu meminimalisir dalam penyelewengan pihak swasta karena dalam hal ini pemerintah harus memegang kendali dalam regulasinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, belum adanya Perda yang mengatur tentang desa wisata yang ada di Kabupaten Purworejo mengakibatkan kurang maksimalnya kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dengan masyarakat Desa Wisata Kaligono.

b. Fasilitator

Dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based touris*), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam hal sarana prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Saran dan prasarana yang diberika bisa berupa fisik dan non fisik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator lebih dominan memfasilitasi secara non fisik. Fasilitas dalam bentuk fisik terhadap pengembangan Desa Wisata Kaligono masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sarana pendukung obyek wisata seperti mushola, toilet, akses jalan menuju obyek wisata yang kurang layak dan perlu untuk dibenahi. Jadi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo hanya memberikan pelatihan dan pembinaan tanpa diimbangi dengan bantuan modal.

2. Promosi

Kerjasama yang dilakukan dalam bidang promosi antara lain membuat *leaflet*, *guide book*, promosi melalui media sosial seperti facebook dan instagram, melakukan kerjasama dengan wartawan serta program *travel dialog*. Program *travel dialog* merupakan sebuah program promosi yang dilakukan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan dan merupakan inisiatif dari pengelola Desa Wisata Kaligono. Program *travel dialog* mewajibkan seluruh siswa yang ada di Purworejo untuk berkunjung ke obyek wisata lokal yang ada di Purworejo sebelum berkunjung ke obyek wisata lain. Pada tahun 2018, promosi melalui kegiatan *travel dialog* ditiadakan dengan alasan diganti dengan kegiatan promosi lain padahal pengelola Dewi Kano menilai program ini cukup efektif untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat dianalisa bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat minim dalam melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Selain itu, kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam promosi Desa Wisata Kaligono masih sangat minim karena promosi yang dilakukan mencakup semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Purworejo sehingga belum ada perhatian secara khusus oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

C. Dampak Kerjasama Terhadap Pengembangan Obyek Wisata

Kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pengembangan desa wisata meliputi pelatihan dan pembinaan. Kerjasama masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berpengaruh terhadap perbaikan fasilitas obyek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 jenis wisata yang terdapat di Desa Wisata Kaligono, tidak ada satupun obyek wisata yang mengalami perbaikan fasilitas setelah diadakannya kerjasama tersebut. Fasilitas tersebut diantaranya adalah *homestay*, warung makan, toilet, tempat parkir, tempat sampah, papan informasi dan rumah budaya. Fasilitas tersebut justru dibangun dari bantuan PNPM Pariwisata selama tiga tahun sebesar 240 juta dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Setelah tahun 2013 pembangunan berasal dari hasil pendapatan obyek wisata yang dikelola oleh Pokdarwis.

Obyek wisata yang pembangunan fasilitasnya mendapatkan bantuan dana dari PNPM Pariwisata yaitu obyek wisata Curug Siklothok. Sedangkan pembangunan fasilitas yang berasal dari swadaya masyarakat adalah obyek wisata Taman Sidandang. Berdasarkan hasil penelitian, obyek wisata religi dan obyek wisata budaya kurang mendapatkan perhatian dari pengelola Pokdarwis. Mereka lebih

berfokus pada wisata alam karena wisata tersebut dianggap lebih berpotensi. Wisata alam berkontribusi dalam peningkatan PADes. Perbaikan fasilitas tersebut mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kaligono. Peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak pada peningkatan pemasukan dari hasil pengelolaan desa wisata dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun Desa Wisata Kaligono mengalami peningkatan jumlah pengunjung dan puncak peningkatan pengunjung terjadi pada tahun 2017. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut dapat dilihat dari data jumlah wisatawan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Pengunjung Desa Wisata Kaligono

Tahun	Jumlah Pengunjung	
	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Asing
2014	16.440	-
2015	34.226	-
2016	45.937	-
2017	74.327	5

Sumber : Laporan Kunjungan Wisatawan Dinparbud

Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 61,8% wisatawan nusantara dan 5 wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Salah satu dampak dari adanya desa wisata ini adalah peningkatan perekonomian terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata, seperti pengelola Pokdarwis, pemilik *homestay*, pemilik rental mobil ataupun masyarakat dengan profesi tertentu yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, adanya desa wisata mampu membuka pasar bagi petani setempat. Sebelum terbentuk desa wisata, petani Desa Kaligono menjual hasil bumi ke Pasar Baledono yang terletak di pusat kota Kabupaten Purworejo dengan harga yang rendah. Namun setelah ada desa wisata, petani dapat menjual hasil panennya di desa dengan cara membuka lapak-lapak di sepanjang jalan Desa Kaligono dan lebih menguntungkan. Selain itu, dampak

positif dari adanya desa wisata adalah terciptanya lapangan pekerjaan seperti petugas parkir, penjaga loket obyek wisata dan membuka warung makan disekitar obyek wisata.

Seiring kesadaran pentingnya menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung, maka warga menjadi lebih sadar pentingnya kebersihan lingkungan dan pemeliharaan alam. Masyarakat Desa Wisata Kaligono menjalankan agenda gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara rutin setiap hari Jum'at agar pengunjung merasa nyaman. Dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan, pemerintah desa membuat perdes tentang larangan pengambilan ikan disungai agar habitat air sungai tidak punah. Selain itu, sebagai tindakan preventif untuk menanggulangi tanah longsor yang sering terjadi di Desa Wisata Kaligono. Pemerintah desa menganjurkan masyarakat untuk menanam pohon yang produktif seperti manggis dan mengurangi penanaman pohon seperti jati, mahoni dan pohon kayu lainnya yang sering ditebang untuk dimanfaatkan kayunya. Dampak positif tersebut merupakan hasil dari kesadaran dan partisipas masyarakat setempat dan bukan hasil dari kerjasama.

Kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak optimal dikarenakan tidak adanya MOU yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan hanya berupa jaringan kerja (*networking*) atau berupa keterlibatan satu sama lain antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata dengan masing-masing tugas yang dijalankan sehingga tidak memiliki payung hukum yang jelas.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

Faktor Pendukung

1. Potensi Desa

Desa Wisata Kaligono memiliki potensi alam yang masih asri, potensi budaya serta hasil bumi yang cukup melimpah. Potensi alam yang sudah ada sejak dahulu berupa Curug Siklothok, curug ini sudah ramai didatangi pengunjung sebelum adanya desa wisata. Selain poteni alam yang indah juga terdapat potensi budaya, potensi budaya yang masih sangat kental yang ada di Desa Wisata

Kaligono menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang ingin mempelajari budaya Indonesia.

2. Peran Serta Masyarakat/ Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Desa Wisata Kaligono merupakan masyarakat yang mudah diajak bekerjasama dan peduli terhadap lingkungan. Pada awal terbentuknya Desa Wisata Kaligono sempat terjadi pro kontra karena kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Kaligono justru sangat mendukung dan berkontribusi aktif terhadap program-program desa wisata. Partisipasi masyarakat yang besar terhadap pengembangan desa wisata tidak terlepas dari peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi semacam penggerak kegiatan desa wisata. Keberadaan kelompok sadar wisata tersebut menjadi begitu penting mengingat kesadaran masyarakat yang belum optimal terutama kesiapan dari seluruh masyarakat untuk membuka diri dan ikut serta mengelola desa wisata.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Anggaran

Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Desa Kaligono mendapatkan bantuan dana dari PNPM Pariwisata. Setelah PNPM Pariwisata ditiadakan, pendanaan untuk pengembangan desa wisata mengandalkan hasil pengelolaan obyek wisata yang jumlahnya tidak besar. Hasil pengelolaan obyek wisata yang ada di Desa Kaligono diperoleh dari retribusi masuk dan retribusi parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) dan dijalankan oleh Pokdarwis masing-masing. Dari hasil pengelolaan obyek wisata tersebut 40% dialokasikan untuk pengelola Pokdarwis, 25% masuk kas dusun setempat, 10% masuk ke kas desa menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), 10% untuk biaya operasional dan sisanya untuk pengembangan. Jadi alokasi yang digunakan untuk pengembangan obyek wisata sebesar 15%. Jumlah ini tidaklah cukup untuk membangun sarana prasarana obyek wisata yang tentunya memakan anggaran yang sangat besar.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata belum memberikan bantuan anggaran secara khusus kepada Desa Wisata Kaligono. Anggaran yang

digunakan untuk kegiatan desa wisata bersumber dari APBD dengan alokasi untuk seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Purworejo.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Desa Wisata Kaligono terkendala dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai. Sumberdaya manusia tersebut meliputi pengelola desa wisata tingkat desa, pengelola Pokdarwis maupun anggota Pokdarwis. Dari segi kuantitas, jumlah anggota Pokdarwis mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan utama selain menjadi pengelola desa wisata sehingga mengelola desa wisata hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bekerja sebagai pengelola Desa Wisata Kaligono ini belum dapat dijadikan sebagai pendapatan utama karena penghasilan yang didapat dari mengelola destinasi wisata belum mampu mencukupi kehidupan mereka. Dari perbandingan jumlah tenaga pengelola dan luas lahan wisata yang ada tidaklah memadai, apalagi jika jumlah kunjungan sedang melojak.

Keterbatasan SDM dari segi kualitas dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan masyarakat desa yang masih tergolong rendah. Mayoritas pengelola desa wisata belum memahami bagaimana cara mengelola destinasi wisata yang baik dan benar. Untuk meningkatkan *skill* dan kualitas setiap pemandu maka perlu diadakan pembinaan dan pelatihan. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, pemahaman pengelola tentang pengelolaan desa wisata di Desa Wisata Kaligono belum merata, hal ini disebabkan oleh pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya diikuti oleh pengelola-pengelola tertentu karena pengelola yang lain sering menolak ajakan untuk mengikuti pelatihan.

3. Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata yang Belum Memadai

Kondisi sarana dan prasarana di Desa Wisata Kaligono kurang memadai disebabkan oleh kurangnya bantuan dana dari pemerintah. Sarana prasarana tersebut diantaranya sarana transportasi umum yang kurang memadai, belum tersedianya tempat ibadah di kawasan obyek wisata, kondisi tempat parkir yang tidak memadai serta jaringan telekomunikasi yang buruk.

PENUTUP

Kesimpulan

Kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak optimal dikarenakan tidak adanya MOU yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan hanya berupa jaringan kerja (*networking*) atau berupa keterlibatan satu sama lain antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata dengan masing-masing tugas yang dijalankan sehingga tidak memiliki payung hukum yang jelas. Kerjasama masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berpengaruh terhadap perbaikan fasilitas obyek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 jenis wisata yang terdapat di Desa Wisata Kaligono, tidak ada satupun obyek wisata yang mengalami perbaikan fasilitas setelah diadakannya kerjasama tersebut. Fasilitas tersebut justru dibangun dari bantuan PNPM Pariwisata selama tiga tahun sebesar 240 juta dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Setelah tahun 2013 pembangunan berasal dari hasil pendapatan obyek wisata yang dikelola oleh Pokdarwis. Dampak dari adanya desa wisata bagi masyarakat Desa Kaligono adalah peningkatan perekonomian masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, hal tersebut merupakan hasil dari tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan hasil dari kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang di atas, maka saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah kerjasama sebaiknya diformalkan melalui MoU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ditjen Pariwisata. 1999. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Khitam, Muhammad Chusnul. “*Ekonomi Bisnis*”, Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata, Vol. IV, No.1, 2012, hlm.338-339.
- Moeleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosakarya.
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Najiati, Sri dkk.2005.*Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – 1P.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pitana, I Gde. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta:Andi.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Ami Suswandi. ”*Nasional Pariwisata*”,Pola Kemitaan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. Vol. 5, No. 3. 2013, hlm. 190.
- Spillane, JJ. 1993. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarkat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Internet

[www.academia.edu/6423956/Buku Pedoman Umum Desa Wisata](http://www.academia.edu/6423956/Buku_Pedoman_Umum_Desa_Wisata), diakses pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 23.24 WIB.

http://digilib.uin-suka.ac.id/16344/1/11230083_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.17 WIB.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20293547T29802Pemberdayaan%20masyarakat.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.30 WIB.

eprints.uny.ac.id/27075/1/Nur%20Rika%20Puspita%20Sari.pdf, diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 09.45 WIB.